MAKALAH
ALIRAN ANTROPOLOGI HUKUM

Nama : Denny Iswadi

Email : dennyiswadi79@gmail.com

No. BP : 2010003600002

Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti

Bab 1

Pendahuluan

A. Pengertian Antropologi Hukum

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandanganya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama.

Disiplin ilmu ini memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal.

Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:

1. William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.

2. David Hunter

Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.

3. Koentjaraningrat

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga

setiap manusia yang satu dengan yang lainnya dapat diketahui perbedaannya.

B. Objek Antropologi Hukum

Objek Antropologi Hukum adalah: (1) perilaku hukum masyarakat, (2) budaya hukum masyarakat, dan (3) cara pandang masyarakat terhadap hukum serta produk-produk turunannya. Sejak Antropologi Hukum itu merupakan bagian dari antropologi, objeknyapun lebih sempit daripada objek antropologi, yaitu manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Antropologi Hukum lahir sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman hukum dalam masyarakat. Hukum telah diajarkan berabad-abad lamanya di berbagai perguruan tinggi mulai perguruan tinggi hukum di Genoa pada abad pertengahan

lampau hingga kini. Hukum selalu diartikan sebagai sebuah *rule*, perintah dari kehendak penguasa negara, sehingga logis bahwa hanya ada satu hukum dalam sebuah negara untuk mengatur rakyatnya. Hukum secara kodrati mengatur perilaku manusia, seburuk apapun hukum adalah jauh lebih baik daripada tidak ada hukum.

Harus disadari bahwa hukum lahir dan berkembang dari sebuah kebudayaan, sehingga akan menjadi logis bahwa tidak ada hukum yang seragam, karena tidak ada kebudayaan yang bersifat seragam. Hukum yang berlaku bagi masyarakat Batak tentu saja akan berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Minang, dan tentu saja akan berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Jawa dan Sunda, atau bahkan hukum yang berlaku pada masyarakat Eskimo berbeda dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indian di Amerika. Untuk negara sebesar dan seluas Indonesia tentunya memberlakukan hukum secara seragam terhadap masyarakat yang memiliki berbagai ragam

kebudayaan di Indonesia akan menjadi tidak adil.

Dalam perspektif Antropologi Hukum, hukum lahir dari kebudayaan. Melihat hal tersebut di atas tentunya menyadarkan kepada kita akan peran Antropologi Hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang pula dari berbagai corak dan ragam kebudayaan. Mempelajari Antropologi Hukum berarti kita melihat sebuah realitas, kenyataan atas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan di masyarakat.

Satu hal yang dapat kita ambil dari Antropologi Hukum, adalah diharapkan dapat memunculkan kesadaran atas kenyataan adanya keberagaman hukum karena beragamnya budaya. Beragamnya hukum tersebut jangan dimaknakan sebagai pertentangan hukum (*conflict of laws*), tetapi patut dianggap sebagai *khazanah* kekayaan hukum yang akan mampu memperkuat serta memperbaharui hukum nasional. Di sisi lain akibatnya adalah memunculkan sikap toleransi untuk menghargai umat manusia

yang beragam pola pikir, karakter, pemahaman, dan tentunya juga beragam hukum.

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan, sebagaimana Firman Allah: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti" (Q.S. Al-Hujurat: 12).

C. Pendekatan

Salah satu hal yang menarik dari Antropologi Hukum adalah cara pendekatannya. Apalagi sudah dikembangkan satu pendekatan lagi yang awalnya hanya sentralisme, kini sudah ada pendekatan pluralisme. Pendekatan sentralisme merupakan pendekatan yang menganggap perilaku dalam suatu masyarakat hanya dikarenakan satu sistem hukum. Sedangkan pendekatan pluralisme melihat perilaku masyarakat dipengaruhi oleh beberapa

sistem hukum yang ada di tengah masyarakat. Sebab, dalam satu ruang lingkup masyarakat selalu ada sistem hukum yang beragam, meski kekuatan memengaruhinya kecil. Pada kenyataannya, pendekatan pluralisme lebih dianjurkan. Sebab, pada masyarakat tidak hanya ada satu hukum saja, melainkan banyak hukum. Hanya, ada dominasi antara satu terhadap hukum lainnya.

Misalnya, pada perilaku masyarakat Madura. Ada golongan masyarakat tertentu yang perilakunya didominasi oleh kekuatan hukum lokal, hukum agama dan hukum negara. Sebagai contoh perilaku *carok* yang dulu sering dikaitkan pada masyarakat Madura secara umum. Padahal, tidak semua masyarakat Madura selalu melakukan *carok* ketika merasa kehormatannya terganggu.

Carok pada dasarnya adalah sebuah hukum lokal yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu sebagai pembelaan atas harga diri. Tetapi, hukum lokal itu jelas tidak akan dipakai oleh golongan atau segmen masyarakat agamis yang sangat dipengaruhi oleh hukum syariat. Masyarakat pesantren misalnya,

jangankan membunuh, berkata kotor saja mereka enggan dan melarang mengatakannya kepada orang lain.

Perbedaan masyarakat Madura yang dipengaruhi hukum lokal, agama dan hukum negara bisa dilihat setelah mereka melakukan perbuatan. Sebelumnya tak ada satupun yang tahu, hukum apa yang mendominasi pemikirannya untuk bertindak *spesifik*.

Perebutan istri biasanya menjadi contoh yang paling sering dipakai untuk menilai perilaku masyarakat Madura dalam menyelesaikan masalah. Hingga saat ini, yang sering timbul ke permukaan adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan hukum lokal, yaitu *carok*. Sebab, perilaku tersebut dinilai benar oleh lingkungan tertentu untuk membela kehormatan diri. Tetapi, bukan tidak ada yang memilih untuk menceraikan istrinya berdasarkan hukum agama sebagai jalan keluar dari permasalahan. Ada pula yang memilih melaporkan istri dan laki-laki selingkuhannya ke polisi supaya diproses secara hukum negara.

Jadi salah besar kalau kemudian disimpulkan bahwa semua warga masyarakat Madura selalu menyelesaikan masalah dengan hukum lokal. Banyak juga yang memakai hukum Islam dan hukum negara. Yang jelas, ada tiga hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pilihan untuk melakukan tindakan tertentu itu sangat tergantung pada lingkungan, latar belakang pendidikan serta wawasan seseorang tentang kebenaran. Bukan hal yang aneh, ketika ada seorang yang patuh dan paham hukum negara, tapi melakukan pembunuhan, karena menganggap kematian lawannya adalah satu-satunya cara menyelesaikan pertikaian. Tergantung pada referensi hukum yang dipilih. Tidak bisa dipastikan, kita hanya tahu setelah ada perbuatan.

Bab 2

Pembahasan

A. Antropologi Hukum sebagai Sebuah Disiplin Ilmu

Antropologi Hukum merupakan cabang ilmu dari Antropologi. Ia bukan satu-satunya ilmu sosial yang mempelajari manusia dan berbagai aspek kehidupannya. Disampingnya ada berbagai disiplin ilmu yang objek materinya sama, manusia, antara lain Sosiologi, Sosiologi Hukum, Sejarah, Ekonomi, Ilmu Hukum, Politik, Psikologi dan lain-lain.

Antropologi Hukum sudah merupakan suatu disiplin ilmu, karena ia telah memenuhi tiga unsur utama dari sebuah disiplin ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek itu membedakan satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya.

Ontologi adalah pembahasan tentang hakekat pengetahuan. Ontologi membahas pertanyaan-pertanyaan semacam ini: Objek apa yang ditelaah pengetahuan? Adakah objek tersebut? Bagaimana wujud hakikinya? Dapatkah objek tersebut diketahui

oleh manusia, dan bagaimana caranya?

Sains (dalam bahasa Indonesia disebut juga ilmu, ilmu pengetahuan, atau pengetahuan ilmiah) adalah pengetahuan yang tertata (*any organized knowledge*) secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah (*scientific method*). Sains mempelajari segala sesuatu sepanjang masih berada dalam lingkup pengalaman empiris manusia.

Objek sains terbagi dua, objek material dan objek formal. Objek material terbatas jumlahnya dan satu atau lebih sains bisa memiliki objek material yang sama. Sains dibedakan satu sama lain berdasarkan objek formalnya. Sosiologi dan antropologi memiliki objek material yang sama, yakni masyarakat. Namun objek formalnya beda. Sosiologi mempelajari struktur dan dinamika masyarakat, antropologi mempelajari masyarakat dalam budaya tertentu.

Satu sisi yang sering diperdebatkan adalah menyangkut netralitas sains, kaitannya dengan agama atau ideologi tertentu.

Lahirnya suatu teori juga ternyata tidak bisa dilepaskan dari konteks tempat teori itu dilahirkan. Konteks meliputi pandangan dunia yang dianut ilmuwan, latar belakang budaya, bahasa, dll. Pengaruh konteks ini terutama sangat terasa pada sains sosial sehingga suatu sains bisa menghasilkan beragam aliran dan perspektif.

Perbedaan suatu pengetahuan dengan pengetahuan lain tidak mesti dicirikan oleh perbedaan dalam ketiga aspek itu sekaligus. Bisa jadi objek dari dua pengetahuan sama, tetapi metode dan penggunaannya berbeda.

Menurut Filsafat Ilmu, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Berbedanya cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut serta tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut membedakan antara jenis pengetahuan yang satu dengan yang lainnya.

B. Manfaat Mempelajari Antropologi Hukum

Segala yang ada di dunia ini sudah pasti memiliki manfaat masing-masing. Teori-teori dalam Antropologi Hukum yang diperoleh lewat metode sains bukanlah terutama untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Kegunaan itu diperoleh dengan tiga cara, *description* (menjelaskan), *prediction* (meramal, memerkirakan), dan *controlling* (mengontrol). Penjelasan diperoleh dari teori.

Bab 3

Penutup

Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangya terhadap hukum dan produk turunannya.

Antropologi Hukum merupakan cabang ilmu dari Antropologi. Ia bukan satu-satunya ilmu sosial yang mempelajari manusia dan berbagai aspek kehidupannya.

Antropologi Hukum sudah merupakan suatu disiplin ilmu, karena ia telah memenuhi tiga unsur utama dari sebuah disiplin ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa.

Antropologi. Istilah antropologi berasal dari Bahasa

Yunani, yaitu berasal dari kata *anthropos* dan *logos*. *Anthropos* berarti manusia dan *logos* memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Ascribed-status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Pada umumnya *ascribed status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup, misalnya masyarakat feodal (bangsawan, kasta).

Carok pada dasarnya adalah sebuah hukum lokal yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu sebagai pembelaan atas harga diri. Tetapi, hukum lokal itu jelas tidak akan dipakai oleh golongan atau segmen masyarakat agamis yang sangat dipengaruhi oleh hukum syariat. Masyarakat pesantren misalnya, jangankan membunuh, berkata kotor saja mereka enggan dan melarang mengatakannya kepada orang lain.

Hukum sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *dassollen* dan *das-sein*. Sebagai *das-sollen*, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *das-sollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.

Hukum sebagai tata nilai, artinya hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.

Daftar Pustaka

- Allot, A and R. Woodman Gordon (Eds.), *People's Law and State Law*, (Dordrecht, Holland: Foris Publication), 1975.
- Arief Budiman (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia, Jakarta.
- Armstrong, Karen (2001), *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Mizan, Bandung.
- Armstrong, Karen (2002), *Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, IKON TERALITERA, Yogyakarta.
- Barr, James (1996), *Fundamentalisme*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Beilharz, Peter (2003), *Teori-teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bellah, Robert N. (2000), *Beyond Belief Esei-esai tentang Agama di Dunia Modern*, Paramadina, Jakarta.
- Bohanan, Paul (Ed), *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*, (New York: The Natural History Press), 1967.
- Campbell, Tom (1994), *Tujuh Teori Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.
- Comaroff and Simon Roberts, *Rules and Processes, The Cultural Logic of Disputes in An African Context*, (Chicago-London: The University of Chicago), 1981.
- Davis F, Allen & Woodman D. Harold (1980), *Conflict and Consensus*. D.C. Heat and Company, New York.